

ABSTRAK

Anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dipelihara tumbuhkembangnya sehingga kelak di masa depan mereka akan tumbuh menjadi generasi bangsa yang berkualitas. Perkembangan populasi yang sangat cepat namun tidak diimbangi dengan perbaikan ekonomi mengakibatkan banyak anak yang tidak dipelihara dengan baik dan terlantar. Negara melindungi anak-anak yang terlantar, sebagaimana termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Masyarakat telah lama mengenal lembaga hukum pengangkatan anak bahkan sebelum masa Rasulullah masyarakat jahiliah telah menerapkan sistem pengangkatan anak dengan motivasi atau tujuan yang berbeda-beda antara lain untuk melanjutkan keturunan, meneruskan usaha dan sebagainya. Di Indonesia masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang proses pelaksanaan pengangkatan anak di pengadilan, sejak pengajuan perkara permohonan pengangkatan anak, pemeriksaan perkara di persidangan sampai dengan tahap penetapan hakim, serta bagaimana akibat hukum adanya pengangkatan anak tersebut. Oleh karenanya penulis tertarik untuk menyusun tesis berjudul AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DEMAK Nomor 09/Pdt.P/2018/PA DMK. TENTANG TERKABULNYA PENGANGKATAN ANAK.

Penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana proses pelaksanaan Pengangkatan Anak oleh Hakim Pengadilan Agama Demak dalam perkara Nomor 09/Pdt.P/2018/PA DMK, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut serta akibat hukumnya. Selanjutnya penulis menganalisa permasalahan tersebut dari beberapa teori yaitu teori keadilan, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam penetapan pengangkatan anak.

Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pengangkatan anak dalam perkara Nomor 09/Pdt.P/2018/PA DMK dilakukan bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan kesejahteraan serta perlindungan anak, serta hakim sudah tepat dalam menerapkan hukum sesuai dengan hukum formil dan materil yang ada. Akibat hukum adanya penetapan ini adalah hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya berbentuk hubungan hukum berupa peralihan tanggung jawab dari orang tua kandungnya dan tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain, akan tetapi anak angkat dapat menerima wasiat, begitu pula sebaliknya.

KATA KUNCI: Pengangkatan Anak, Proses Pelaksanaan, Akibat Hukum.

ABTRACT

*Children are a mandate that must be maintained and maintained by their growth so that in the future they will grow into a quality generation of the nation. The rapid development of the population but not balanced by economic improvements has resulted in many children not being well-maintained and neglected. The state protects abandoned children, as contained in Article 34 paragraph (1) of the 4th Amendment of the 1945 Constitution and Article 52 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, where every child has the right to protection by parents, family, community and country. The community has long known the legal institution of adopting children even before the time of the Prophet Muhammad the ignorant community has implemented a system of adoption of children with different motivations or goals, among others, to continue descent, continue the business and so on. In Indonesia, there are not many people who know about the process of adopting children in court, since filing a petition for appointing a child, examining cases at the trial up to the stage of determining the judge, and how the legal consequences of adopting the child. Therefore the authors are interested in compiling a thesis entitled **DUE TO LAW DETERMINATION OF DEMAK RELIGION COURT Number 09 / Pdt.P / 2018 / PA DMK. ABOUT THE ABILITY OF CHILDREN'S RESTRICTION.***

The author raised the issue of how the process of implementing the Appointment of Children by Demak Religious Court Judges in case Number 09 / Pdt.P / 2018 / PA DMK, how the judges considered the case and the legal consequences. Furthermore, the author analyzes these problems from several theories, namely the theory of justice, the theory of legal certainty, the theory of benefits and the theory of legal protection. This study uses a statute approach and a case approach.

The legal approach is used to find out the whole legal regulations, especially the laws governing the adoption of children in Indonesia. The case approach aims to study the application of legal norms or rules in determining adoption.

The conclusions of this study are that the adoption of children in case Number 09 / Pdt.P / 2018 / PA DMK is aimed at the best interests of children in realizing the welfare and protection of children, and the judges are right in applying the law in accordance with formal and material laws. The legal consequence of this determination is the relationship of adopted children with adoptive parents only in the form of legal relations in the form of transfer of responsibility from their biological parents and does not result in legal inheritance between themselves and adoptive parents who have no inheritance to each other, but adopted children can accept a will, and vice versa.

KEY WORDS: Appointment, Implementation Process, Legal Effects.